

Kepemimpinan Polri di Masa Sulit

KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) baru saja memiliki pucuk pimpinan baru, setelah Presiden Jokowi melantik Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri (13/7). Bagi kepolisian, pergantian pimpinan merupakan rutinitas biasa yang niscaya terjadi, sebagaimana juga terjadi pada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Namun tak dapat sangkal setiap pergantian *top leader*, selalu menyembul sejumput asa publik terhadap perbaikan kinerja Polri dalam menjalankan fungsinya. Baik sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (lihat, Pasal 2 UU No. 2/2002 tentang Polri).

Seiring dengan *turbulence* kemajuan zaman yang ditandai dengan teknologi informasi/komunikasi dan dunia jejaring sosial media yang semakin canggih, maka tak terelakkan segala bentuk kejahatan dan/ atau tindak pidana pun semakin rumit dan kompleks. Tentu hal ini mungkin melibatkan jaringan kerja pelaku kejahatan yang sedemikian terorganisir. Peredaran narkoba yang sukses 'menembus' tembok-tembok penjara di sejumlah daerah membuktikan hal itu.

Reformasi

Masa sulit kepolisian tidak hanya berhenti disitu. Indonesia sebagai sebuah bangsa sedang menghadapi persoalan krusial yang berpotensi meruntuhkan sendi-sendi moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebutan Indonesia sebagai negeri serba-darurat masalah-masalah kemanusiaan tak terhindarkan. Mulai darurat narkoba, darurat minuman keras (miras), darurat korupsi, darurat prostitusi, darurat kekerasan pada anak dan perempuan, darurat terorisme, darurat pembunuhan, darurat pemalsuan (vaksin), darurat migrasi ilegal, darurat ilegal fishing, darurat ilegal logging dan sebagainya.

Hal ini berarti kepolisian menghadapi tantangan yang semakin berat, karena upaya pengungkapan kejahatan atau pelanggaran hukum, eskalasi kesulitannya semakin berlipat. Sehingga cukup beralasan jika Presiden

Imron Rosyadi

Jokowi menginstruksikan Kapolri baru untuk melakukan dua hal di tubuh Polri. *Pertama*, menjaga persatuan dan kekompakan internal Polri. Soliditas institusi kepolisian sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya duabelas poin tugas-tugas kepolisian sebagaimana termaktub dalam UU tentang Polri (Pasal 14 UU No. 2/2002). *Kedua*, melakukan reformasi secara menyeluruh di tubuh Polri. Keberhasilan menjalankan tugas-tugas kepolisian sangat bergantung pada *trust* yang dibangun polisi untuk publik. Maknanya, kepolisian dari hulu ke hilir dituntut memiliki integritas dan menjadi pelayan masyarakat yang profesional, serta beritikad baik.

Karakter

Untuk menghadapi masa sulit, kepolisian membutuhkan hadirnya pemimpin yang memiliki karakter khusus. Sejalan dengan permintaan Presiden RI, pakar strategi bisnis terkemuka Rham Charan (2010) merinci sejumlah karakter kepemimpinan yang dipandang penting untuk mengelola 'kemosotan' suatu organisasi/institusi. *Pertama*, kejujuran dan kredibilitas. Gelombang surut kepercayaan publik kepada Institusi Polri kerap terjadi, misalnya saja kasus 'rekening gendut' yang diduga melibatkan para petinggi Polri, sempat menjadi sorotan publik secara meluas. Maka tidak ada pilihan lain, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dibutuhkan pemimpin kepolisian yang jujur (anti-korupsi, kolusi dan nepotisme) dan kredibel.

Kedua, kemampuan untuk menginspirasi. Jenderal Hoegeng barangkali teladan yang baik di lingkungan kepolisian, karena ketulusan, pengabdian dan kesederhanaannya layak menjadi inspirasi polisi sebagai pengayom,

pelindung dan pelayan masyarakat. *Ketiga*, koneksi tepat waktu dengan realitas. Dalam lingkungan yang rentan dan tidak pasti, realitas adalah sebuah target bergerak. Maknanya pimpinan Polri dituntut untuk selalu memperbaharui 'gambaran' tentang realitas di lapangan yang terus berubah, kejahatan/kriminal kontemporer harus juga diikuti dengan penanganan kasus kontemporer.

Keempat, keberanian membangun masa depan. Tuntutan Presiden Jokowi, agar Polri melakukan reformasi ke dalam merupakan tantangan yang harus disambut antusias seluruh jajaran pimpinan Polri, demi terwujudnya institusi Polri yang kredibel, berwibawa dan berintegritas di masa depan

Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sindiran/guyonan bernada sinis yang dialamatkan pada kepolisian, yang menyatakan bahwa hanya ada tiga polisi jujur, yakni Hoegeng, patung polisi dan polisi tidur. Namun segenap anggota kepolisian berkarakter jujur, terutama para petingginya. □ - o

*) **Imron Rosyadi**, Dosen FEB

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan
Kandidat Doktor Ekonomi Islam UIN Suka
Yogyakarta.

Pojok KR

Rumah sakit di Yogya tak terlibat penggunaan vaksin palsu.

- **Pasien dari kota lain bisa lari ke Yogya.**

Bantul masih dalam kemarau basah. Ombak laut masih bisa meninggi.

- **Kemarau basah dan kering sama-sama berisiko.**

Bandara Adisutjipto kini punya toilet portabel yang harum.

- **Terminal bus suatu saat bisa menyusul.**

Berabe